

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 merupakan salah satu peristiwa ekonomi terbesar yang memengaruhi kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Krisis ini diawali oleh devaluasi¹ tajam mata uang baht di Thailand, yang kemudian menyebar ke negara-negara di sekitarnya. Dampak krisis tersebut di Indonesia dirasakan pada berbagai sektor perekonomian, khususnya sektor perbankan yang mengalami tekanan serius. Pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.650 per dolar AS pada Januari 1998 memicu lonjakan inflasi², meningkatkan beban utang luar negeri, serta menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.³

Krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang paling membekas dalam sejarah negara ini. Krisis ini bukan hanya berdampak pada sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga memicu gejolak sosial dan politik yang cukup besar. Periode krisis moneter tersebut dipandang sebagai salah satu masa paling sulit dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan.⁴

Bank Indonesia selaku otoritas moneter⁵ nasional berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk memulihkan stabilitas perekonomian, terutama dalam

¹ Penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas dengan tujuan memperbaiki perekonomian. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 22.56.

² Kemerostan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.03.

³ Anwar Nasution, "The Meltdown of the Indonesian Economy in 1997-1998," *Seoul Journal of Economics*, Vol. 11, No. 4, 1998: hal. 448-462. <https://hdl.handle.net/10371/1143>

⁴ Ardi Sunardi, dkk., "Krisis Moneter 1997-1998: Akar Penyebab, Dampak Ekonomi, dan Kebijakan Penanganan di Indonesia," *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, Vol. 5, No. 6, 2024. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i7.4197>

⁵ Lembaga yang berwenang mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan berhak menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan

menjaga keberlangsungan sistem perbankan. Pada periode tersebut, sejumlah bank menghadapi gangguan likuiditas yang serius serta ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur asing. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar dan menurunnya kepercayaan pasar. Dalam merespons situasi krisis tersebut, Bank Indonesia menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan darurat yang bertujuan untuk menahan eskalasi instabilitas serta mencegah keruntuhan sistem perbankan secara menyeluruh. Salah satu instrumen kebijakan yang menonjol adalah penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Melalui skema BLBI ini, Bank Indonesia berupaya menjaga kelangsungan operasional perbankan dan menahan dampak sistemik yang dapat memperdalam krisis ekonomi nasional.⁶

Upaya pencegahan terhadap terjadinya *bank run* dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dengan menerapkan kebijakan *blanket guarantee* pada tahun 1998. *Bank run* merupakan kondisi ketika nasabah melakukan penarikan dana secara besar-besaran akibat kepanikan. Kebijakan *blanket guarantee* memberikan jaminan atas seluruh simpanan perbankan baik di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Penerapan kebijakan ini berkontribusi dalam meredam kepanikan masyarakat dan mencegah gangguan yang bersifat sistemik terhadap stabilitas perbankan dalam jangka pendek. Meskipun demikian kebijakan *blanket guarantee* menimbulkan konsekuensi fiskal yang besar dan berdampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan laporan Bank Indonesia pelaksanaan program ini membutuhkan dana lebih dari Rp600 triliun yang selanjutnya menjadi salah satu faktor yang memperpanjang proses pemulihan ekonomi Indonesia pada periode pascakrisis.

Di tengah tantangan tersebut, peran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian likuiditas dan kebijakan penjaminan. Bank Indonesia juga berperan dalam memperketat pengawasan terhadap bank-bank yang bermasalah serta

uang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*. Diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul 23.48.

⁶ Sjamsuddin, T., *Bank Indonesia dan Stabilitas Ekonomi Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hal. 103.

mendorong konsolidasi perbankan melalui penutupan bank-bank yang tidak sehat. Namun, kebijakan ini juga menuai protes karena dianggap terlambat dan tidak efektif dalam mencegah keruntuhan sejumlah bank.⁷

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan dan perekonomian selama krisis moneter. Bank Indonesia harus mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang untuk mengatasi gangguan stabilitas moneter yang berdampak langsung pada berbagai aspek ekonomi. Kebijakan ini meliputi pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengawasan perbankan untuk menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat⁸

Di tengah tekanan hebat yang mengguncang bank-bank konvensional akibat lonjakan kewajiban valuta asing dan krisis likuiditas, perkembangan perbankan syariah menghadirkan dinamika yang berbeda. Pada periode krisis moneter 1997–1998, Indonesia baru memiliki satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang masih berada dalam fase konsolidasi kelembagaan dan ekspansi terbatas.

Berbeda dengan bank konvensional yang banyak bergantung pada pembiayaan berbasis bunga serta pinjaman luar negeri dalam valuta asing, perbankan syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan relatif tidak memiliki eksposur valas dalam jumlah besar. Perbedaan struktur pembiayaan tersebut menjadi variabel penting dalam melihat respons dan daya tahannya terhadap guncangan krisis. Kondisi ini membuka ruang analisis mengenai apakah model perbankan syariah secara struktural memiliki tingkat resiliensi yang berbeda dibandingkan sistem perbankan konvensional pada masa krisis moneter.

Dalam konteks sejarah ekonomi Indonesia, Peran Bank Indonesia selama krisis moneter 1997-1998 layak untuk diteliti lebih lanjut tersebut bukan hanya menjadi ujian besar bagi kemampuan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi

⁷ Nasution, A, “*The Meltdown of the Indonesian Economy in 1997-1998*” hal. 154

⁸ Ardi Sunardi, dkk. *Krisis Moneter 1997-1998: Akar Penyebab, Dampak Ekonomi, dan Kebijakan Penanganan di Indonesia*.

pengawasan dan kebijakan moneternya tetapi juga memicu perubahan signifikan dalam peran dan fungsinya. Salah satu hasil dari krisis ini adalah perubahan Undang-Undang yang memberikan Bank Indonesia independensi lebih besar dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia selama periode krisis.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sektor perbankan selama krisis moneter 1997-1998, dengan menelaah kebijakan-kebijakan yang diambil, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap pemulihan sektor perbankan. melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan pandangan yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia tantangan yang dihadapi serta dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pemulihan ekonomi dan stabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil sebuah topik di penelitian ini dengan judul “*Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Perbankan dan Ketahanan Perbankan Syariah Selama Krisis Moneter (1997-1998)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebagai tindak lanjut penelitian ini, yang berjudul "Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan dan Ketahanan Perbankan Syariah Selama Krisis Moneter", demikian diperlukan batasan masalah yang dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana profil Bank Indonesia?
2. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan dan ketahanan perbankan syariah selama krisis moneter tahun 1997-1998?

⁹ Presiden Republik Indonesia, “*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter.*” Jakarta, 1998.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui profil Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan dan ketahanan perbankan syariah selama krisis moneter tahun 1997-1998.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian krusial dalam metode penelitian karena berfungsi sebagai landasan konseptual bagi studi yang dilakukan. Cooper dalam Creswell (2020) menegaskan bahwa kajian pustaka bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian relevan yang telah ada, mengaitkan penelitian yang sedang dilakukan dengan literatur sebelumnya, serta mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan penelitian yang belum terjawab.¹⁰

Penelusuran dari berbagai literatur terkait topik dilakukan penulis dengan tujuan melihat adanya perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini antara lain:

1. Skripsi berjudul *Peranan Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi Tahun 1997–2000* yang ditulis oleh Ivo Fauziah (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014) membahas peranan Bank Indonesia secara umum dalam menghadapi krisis ekonomi periode 1997–2000. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kondisi kelembagaan Bank Indonesia serta kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Meskipun memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Bank Indonesia pada masa krisis, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sektor perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan. Oleh karena itu,

10

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11102/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 20.24

penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada stabilitas perbankan Bank Indonesia selama krisis moneter 1997–1998.

2. Jurnal berjudul *Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Kestabilan Sektor Keuangan dan Kaitannya dengan Rencana Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan* yang ditulis oleh Syahril Sabirin dan dimuat dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2002 membahas peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sektor keuangan secara nasional serta kaitannya dengan wacana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menekankan aspek kelembagaan dan kebijakan makro keuangan, namun tidak secara khusus mengulas peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan pada periode krisis moneter, terutama sebelum terbentuknya OJK. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih sempit dan mendalam, yaitu pada sektor perbankan selama krisis moneter 1997–1998, tanpa membahas pembentukan OJK yang baru terealisasi pada periode pascakrisis. Aspek syariah juga menjadi salah satu kebaruan dalam penelitian ini.
3. Jurnal berjudul *Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Indonesia* yang ditulis oleh Viola Marchella, Nelly Helda Yanti, dan Cahaya Iklima serta dimuat dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)* Volume 28 Nomor 5 Tahun 2024 mengkaji berbagai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, terutama melalui instrumen kebijakan moneter dan pengendalian inflasi dalam konteks kekinian. Kajian tersebut menggunakan perspektif ekonomi makro dengan fokus pada dinamika kontemporer, sehingga tidak secara khusus menelaah peran Bank Indonesia pada masa krisis moneter 1997–1998 maupun dampaknya terhadap sektor perbankan secara historis. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menghadirkan kebaruan berupa pendekatan historis yang dibatasi pada periode krisis moneter 1997–1998, penekanan pada stabilitas perbankan sebagai fokus utama analisis, serta pengintegrasian aspek ketahanan perbankan syariah sebagai variabel kajian yang belum secara eksplisit dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai peran Bank Indonesia pada masa krisis moneter umumnya masih berfokus pada pendekatan ekonomi makro serta analisis

kebijakan secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan dan belum menempatkan dinamika perbankan syariah sebagai bagian dari analisis krisis. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji peran Bank Indonesia selama krisis moneter 1997–1998, menggunakan pendekatan historis, serta menyoroti stabilitas perbankan—termasuk perbankan syariah—sebagai fokus utama kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap peran Bank Indonesia dalam menghadapi krisis moneter.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah karena sesuai untuk mengungkap fakta masa lampau secara sistematis. Louis Gottschalk menjelaskan bahwa metode sejarah mencakup proses pengujian dan analisis kritis terhadap rekaman, dokumen, dan peninggalan autentik dari masa lalu yang dapat dipercaya, serta penyusunan interpretasi dan sintesis atas fakta tersebut menjadi narasi sejarah yang dapat dipercaya.¹¹

sedangkan Kuntowijoyo berpendapat bahwa metode sejarah adalah pelaksanaan petunjuk teknis mengenai sumber atau heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.¹² Metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penulisan ini meliputi empat tahap penelitian sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Kuntowijoyo memaparkan empat tahap penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan heuristik merupakan tahapan awal dari penulisan sejarah yang berarti mencari sumber terkait dengan apa yang akan diteliti. Heuristik yaitu suatu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi dan jejak masa lampau. Heuristik berasal dari kata *heurishein* yang berbahasa Yunani, artinya

¹¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 1969).

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

mencari atau menemukan. Dalam bahasa Latin, heuristik dinamakan sebagai *ars inveniendi* yang berarti seni mencari.¹³

Dalam tahapan ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber. dalam tahapan ini terbagi menjadi dua pengelompokan sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Berikut beberapa sumber yang penulis dapatkan:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang menjadi dasar dalam suatu penelitian, karena di dalamnya terkandung data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan memiliki keterkaitan erat dengan objek kajian. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa sumber primer dapat berupa berbagai bentuk peninggalan dari suatu periode tertentu, seperti dokumen tertulis yang disusun pada masa yang bersangkutan, naskah atau makalah dalam bahasa Latin, serta beragam benda peninggalan masa lampau. Selain itu, sumber primer juga mencakup alat-alat yang digunakan pada zamannya dan artefak yang merepresentasikan kondisi sosial, budaya, maupun historis pada periode tertentu.¹⁴ Adapun beberapa sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Sumber Tertulis

a) Arsip

- (1)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter.
- (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- (3)Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1996/97 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1997.
- (4)Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1997/98 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1998.

¹³ Wardah. E. S, "Metode Penelitian Sejarah", *TSAQOFAH: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 12, No. 2, (2014), hal 165-175.

¹⁴ Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Hal. 73.

(5) Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/99 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada Tahun 1999.

b) Buku

(1) J. Soedradjad Djiwandono. (2001). *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*. Jakarta: LP3ES.

(2) J. Soedradjad Djiwandono. (2005). *Bank Indonesia and The Crisis: An Insider's View*. Singapore: ISEAS Publications.

(3) J. Soedradjad Djiwandono dkk. (2006). *Sejarah Bank Indonesia Periode V: 1997-1999 (Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi, Moneter dan Perbankan)*. Jakarta: Bank Indonesia.

c) Jurnal

(1) J. Soedradjad Djiwandono. (2000). Bank Indonesia and Recent Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 36, No. 1.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan catatan mengenai adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.¹⁵ Beberapa sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Arsip

a) De Javasche Bank. (1952). *Laporan Tahun Pembukuan 1951-1952*. Djakarta: G.Kolff & Co..

b) Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Inventaris Arsip PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1945-1952: Asip Tekstual*. Jakarta: Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI.

2) Buku

a) Prawiranegara, S. (1980). *Pokok-pokok Ekonomi Indonesia Merdeka*. Jakarta: LP3ES.

b) Raharjo, M. (1995). *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: PT Pusaka LP3ES.

¹⁵ Moh Nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017).

- c) A. Tony Prasetyantono. (2000). *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Suatu Pelajaran yang sangat mahal bagi Otoritas Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Alex Media Komputerindo.
- d) Djiwandono, S. (2001). *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- e) Hidayat, H. (2003). *Sistem Politik Orde Baru Menuju Kepudaran: Dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- f) Rosyidi, S. (2003). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- g) Sabirin, S. (2003). *Perjuangan Keluar Dari Krisis: Percikan Pemikiran Dr. Syahril Sabirin*. Yogyakarta: BPFÉ.
- h) Djiwandono, S. (2005). *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959 (Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- i) Djojohadikoesomo, M. (2006). *Kenangan Sebagai Gubernur Pertama Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- j) Kusuma, E. (2014). *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Fragmen Sejarah Bank Sentral di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- k) Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: PT Mizan Utama.
- l) Warjiyo, P. & Juhro, M. (2019). *Kebijakan Moneter di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 3) Skripsi
- a) Fauziah, I. (2014). *Peranan Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi Tahun 1997-2000*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- b) Sapparudin. (2025). *Pemberitaan Koran Pikiran Rakyat pada masa Krisis Moneter di Bandung tahun 1997-1998*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 4) Jurnal

- a) Mariano, R. (2003) "Monetary Policy Approaches and Implementation in Asia: Philippines and Indonesia", *Bank for International Settlements Papers No. 31*.
- b) Tarmidi, L. (2003). "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran Imf Dan Saran". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999. 1 (4), 1 - 25*.
- c) Suhartono. (2009). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13 Nomor 3*.
- d) Hidayat, A & Nurbaity. (2018). "Dinamika Nasionalisasi De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1951-1953)". *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No. 2*.
- e) Andriani, F. & Mohamad, R. (2022). Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil. *Mutaazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Volume 3 Nomor 1*.
- f) Marchella, V. dkk. (2024). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa), Volume 39 Nomor 5*.

2. Kritik

Setelah proses menghimpun sumber melalui tahapan heuristik, maka dilanjutkan pada tahapan kritik yaitu proses penyeleksian sumber yang telah didapatkan dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya terjamin. Tahapan kritik memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah otentitas (*authenticity*).¹⁶

Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal wajib dilakukan oleh sejarawan untuk mengetahui autentisitas atau keaslian sumber. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek- aspek "luar" sumber sejarah. Sedangkan kritik internal menekankan aspek "dalam" dari sumber, yaitu kesaksian (*testimoni*). Setelah fakta

¹⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

kesaksian (*fact of testimony*) ditegakkan melalui kritik eksternal, sejarawan mengadakan evaluasi terhadap kesaksian tersebut, apakah kesaksian dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak.¹⁷

a. Kritik Eksternal

1) Arsip

a) *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter*. Keputusan ini berisi dua halaman yang diketik menggunakan tinta berwarna hitam dan ditandatangani oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, dapat diakses dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) melalui tautan Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/59039/keppres-no-23-tahun-1998>.

Karena telah ada digitalisasi arsip, menjadikan keputusan tersebut masih dapat teridentifikasi sehingga layak dijadikan sumber.

b) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Undang-undang ini berisi 13 bab dan 79 ayat dalam 55 halaman yang diketik menggunakan tinta hitam dan ditandatangani oleh Bachruddin Jusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, dapat diakses dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) melalui tautan Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999>.

Karena telah ada digitalisasi arsip, menjadikan keputusan tersebut masih dapat teridentifikasi sehingga layak dijadikan sumber.

c) *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1996/97*, laporan tersebut penulis dapatkan melalui akses aplikasi *mobile* Perpustakaan digital Bank Indonesia, yaitu *iBI Library*. Sampul laporan berwarna kuning keemasan, memiliki 117 halaman serta warna tinta yang digunakan pada sampul serta isinya berwarna hitam.

d) *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1997/98*, laporan tersebut penulis dapatkan melalui akses aplikasi *mobile* Perpustakaan digital Bank Indonesia, yaitu *iBI Library*. Sampul laporan berwarna hijau, memiliki 230 halaman

¹⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Hal. 45.

serta warna tinta dalam sampul berwarna putih, sedangkan pada isinya berwarna hitam.

- e) *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/99*, laporan tersebut penulis dapatkan melalui akses aplikasi *mobile* Perpustakaan digital Bank Indonesia, yaitu *iBI Library*. Sampul laporan berwarna hijau memiliki 222 halaman, serta warna tinta dalam sampul berwarna kuning, sedangkan pada isinya berwarna hitam.

Kondisi laporan-laporan tersebut masih layak untuk dijadikan sumber karena ada proses digitalisasi, dapat terlihat dari isi laporan yang masih rapi tanpa ada goresan atau kerusakan lainnya.

2) Buku

- a) Buku yang berjudul *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono. Buku yang memiliki ukuran 15,5 x 23 cm tersebut ditulis dalam *bookpaper* yang berwarna sedikit kekuningan menggunakan tinta hitam dan memiliki 398 halaman. Kondisi buku masih terlihat baru sehingga tidak ada kerusakan yang terlihat, buku ini masih layak untuk digunakan sebagai sumber.
- b) Buku yang berjudul *Bank Indonesia and The Crisis: An Insider's View* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono. Buku ini memiliki 291 halaman, bersampul warna biru dengan gambar gedung Bank Indonesia, diketik menggunakan tinta hitam, dan dapat diakses dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) melalui tautan *ISEAS Publishing*: <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/907>. Dengan adanya akses menuju buku digital, dan halaman dari buku tersebut masih utuh tanpa ada yang terhapus atau terlewat, maka layak untuk dijadikan sumber.
- c) Buku yang berjudul *Sejarah Bank Indonesia Periode V: 1997-1999 (Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi, Moneter dan Perbankan)* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono, dkk. Buku tersebut ditulis dalam kertas *art paper* menggunakan tinta hitam, berbahasa Indonesia dan memiliki 1066 halaman. Kondisi buku sedikit menguning di area samping. Namun masih dalam kondisi baik dimana halaman buku masih terlihat utuh, serta *cover* yang masih terawat.

3) Jurnal

- a) Jurnal yang berjudul *Bank Indonesia and The Recent Crisis* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono. Jurnal tersebut termuat dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* dan dapat diakses *online* melalui laman <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074910012331337783>.

Jurnal tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak ada halaman yang terhapus sehingga masih layak untuk dijadikan sumber.

Kritik eksternal juga penulis lakukan melalui pengarang buku tersebut, yaitu J. Soedradjad Djiwandono, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode Maret 1993 hingga Februari 1998. Selain dikenal sebagai akademisi dan ahli di bidang ilmu ekonomi, posisi beliau sebagai pimpinan Bank Indonesia pada masa krisis menjadikannya sosok yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa J. Soedradjad Djiwandono merupakan pelaku sejarah yang secara langsung menyaksikan peran serta dinamika kondisi Bank Indonesia pada periode tersebut, sehingga kredibilitas sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Kritik Internal

1) Arsip

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1998 *Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter*. Berisi penetapan sasaran-sasaran moneter termasuk suku bunga instrumen, sasaran nilai tukar uang dan kebijakan devisa, perkiraan laju inflasi dan pengaturan likuidasi untuk memulihkan kestabilan moneter dan meningkatkan efektivitas pengendalian. Isi dari keputusan tersebut telah sesuai dengan topik penelitian yang penulis ambil karena Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berperan untuk menjaga bahkan memulihkan stabilitas moneter pada masa itu.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara internal, isi undang-undang ini memuat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tujuan, serta tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, khususnya dalam menjaga dan memelihara

stabilitas nilai rupiah. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya menunjukkan konsistensi antara tujuan kebijakan moneter dengan instrumen yang diberikan kepada Bank Indonesia, seperti kewenangan dalam pengendalian moneter, pengaturan sistem pembayaran, serta pengawasan perbankan. Materi yang terkandung dalam undang-undang ini relevan dengan fokus penelitian karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi peran Bank Indonesia dalam menghadapi krisis moneter. Dengan demikian, secara substansi, isi sumber ini memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dan sejalan dengan konteks kebijakan ekonomi pada masa krisis 1997–1998.

- c) Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1996/97. Laporan ini merupakan laporan Periode 1 April 1996 sampai 31 Maret 1997 berisi tentang gambaran mengenai perkembangan ekonomi makro, sektor keuangan kebijakan moneter serta analisis terhadap tantangan yang dihadapi negara. Dijelaskan juga mengenai laju inflasi yang dapat ditekan sebesar 5,17% yang merupakan laju inflasi terendah sejak tahun 1985/1986.
- d) Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1997/98. Laporan ini merupakan laporan Periode 1 April 1997 sampai 31 Maret 1998 berisi tentang gambaran semua perkembangan di bidang ekonomi moneter dan perbankan serta berbagai langkah kebijakan yang dicapai selama tahun 1997 sampai 1998. Laporan ini juga memberikan analisis mengenai penyebab krisis, mulai dari ketidakseimbangan fundamental ekonomi hingga dampak dari krisis keuangan Asia.
- e) Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/99. Laporan ini merupakan laporan Periode 1 April 1998 sampai 31 Maret 1999 berisi tentang langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi dampak krisis, memulihkan kepercayaan baik investor maupun masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Buku

- a) Buku yang berjudul *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono. Isi dari buku ini yaitu kronologi peristiwa krisis serta analisis mendalam berbagai kebijakan yang diambil oleh

Bank Indonesia dalam merespon krisis juga dampak terhadap perekonomian Indonesia.

- b) Buku yang berjudul *Bank Indonesia and The Crisis: An Insider's View* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono. Buku ini berisikan tentang pengalaman pribadi serta analisis mendalam sudut pandang dalam (*insider*) yaitu Soedradjad sendiri yang pada masa krisis moneter 1997-1998 menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Buku ini membahas kebijakan yang dikeluarkan, kelemahan struktural, serta ketegangan politik dan ekonomi yang melatarbelakangi dan memperparah krisis di Indonesia.
- c) Buku yang berjudul *Sejarah Bank Indonesia Periode V: 1997-1999 (Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi, Moneter dan Perbankan)* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono, dkk. Buku ini berisi tentang gambaran umum kondisi Indonesia sebelum krisis serta semasa krisis, faktor-faktor yang menyebabkan krisis. Di dalam bukunya juga dibahas tentang kebijakan yang diambil Bank Indonesia baik dari penyesuaian suku bunga, intervensi pasar valuta asing, dll. serta dampak dari krisis terhadap sektor keuangan dan upaya pemulihan ekonomi.

3) Jurnal

- a) Jurnal yang berjudul *Bank Indonesia and The Recent Crisis* yang ditulis oleh J. Soedradjad Djiwandono. Jurnal ini membahas tentang penyebab dan dinamika krisis yang bermula dari guncangan eksternal—depresiasi Bath Thailand—, intervensi Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas, hubungan dengan IMF, serta kontroversi *Currency Board System*.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya setelah tahapan kritik dalam metode sejarah adalah tahapan interpretasi. Tahapan interpretasi adalah tahap penafsiran data yang telah ditarik, kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan fakta sejarah yang kronologis, ilmiah dan logis.¹⁸ Pada tahap ini, fakta dirangkai

¹⁸ Dudung Abdurrahman, "*Metode Penelitian Sejarah.*" (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).

sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan fakta sejarah yang utuh dan sistematis. Akan tetapi, analisis mendalam mengenai faktor klausal, kondisional, kontekstual serta unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah sangat diperlukan, karena fakta-fakta yang didapat saja tidak cukup.

Langkah awal yang dilakukan oleh penulis pada tahap ini adalah mengolah, menyusun, dan menafsirkan fakta-fakta sejarah berdasarkan data primer berupa arsip laporan tahunan Bank Indonesia. Dalam proses ini, setiap peristiwa sejarah dikontekstualisasikan dengan kejadian lain yang melingkupinya, sesuai dengan pendekatan historiografi analitis. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang menyeluruh terhadap pokok-pokok permasalahan yang dikaji, yakni peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan selama krisis moneter 1997-1998.

Proses interpretasi dalam penelitian ini ditempuh melalui pendekatan interdisipliner, dengan sejarah sebagai landasan utama analisis. Namun, pemahaman terhadap peristiwa krisis moneter tidak hanya dilihat dari sisi kronologis atau ekonomi semata. Dalam konteks ini, penulis mengintegrasikan perspektif sosiologi untuk menggali bagaimana dinamika sosial, struktur kekuasaan, dan interaksi antaraktor turut membentuk serta memperburuk situasi krisis. Pendekatan ini memungkinkan kajian krisis moneter dipahami sebagai gejala sosial yang berkelindan dengan relasi kelembagaan, respons masyarakat, dan tekanan struktural dalam masyarakat pada masa tersebut.

Dalam kajian sosiologi, penulis mengacu pada teori struktural fungsional yang dipelopori oleh Talcott Parsons. Teori ini merupakan salah satu pendekatan utama dalam tradisi sosiologi klasik yang berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20. Talcott Parsons, seorang sosiolog asal Amerika Serikat, berupaya menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai unsur atau struktur yang saling berkaitan dan bekerja sama secara harmonis untuk menjaga stabilitas serta ketertiban sosial. Melalui pendekatan ini, setiap institusi dalam masyarakat

dipandang memiliki fungsi tertentu yang mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan.¹⁹

Menurut Parsons, masyarakat terdiri atas sistem sosial yang kompleks, di mana setiap unsur—termasuk institusi ekonomi, politik, agama, dan pendidikan—memiliki fungsi tertentu yang mendukung kelangsungan sistem secara keseluruhan. Ketika salah satu bagian terganggu atau tidak menjalankan fungsinya, maka keseimbangan sistem secara keseluruhan dapat terancam²⁰. Dalam kerangka inilah, Parsons memperkenalkan skema AGIL sebagai empat fungsi utama yang harus dipenuhi setiap sistem sosial agar dapat bertahan, yaitu:

1. *Adaptation* (A) – Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengelola sumber daya.
2. *Goal Attainment* (G) – Kemampuan menetapkan tujuan dan mencapainya.
3. *Integration* (I) – Kemampuan menyatukan bagian-bagian sistem agar bekerja secara harmonis.
4. *Latency* (L) atau *Pattern Maintenance* – Kemampuan menjaga nilai-nilai dan motivasi yang mendukung sistem.²¹

Parsons meyakini bahwa setiap institusi dalam masyarakat memainkan peran dalam memenuhi salah satu atau lebih dari fungsi ini, sehingga sistem sosial tetap stabil dan berkelanjutan.²²

Dalam konteks penelitian berjudul "Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Selama Krisis Moneter (1997–1998)", pendekatan struktural fungsional sangat relevan untuk digunakan. Bank Indonesia, sebagai lembaga sentral dalam sistem keuangan nasional, memainkan peran penting dalam mempertahankan fungsi-fungsi dasar sistem ekonomi selama masa disrupsi yang sangat serius, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1997–1998.

¹⁹ Talcott Parsons, *"The Social System"* (New York: The Free Press, 1951), hal. 5-7.

²⁰ Talcott Parsons, *"The Social System,"* hal. 5-7

²¹ Benton Johnson, *"Functionalism in Modern Sociology,"* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), hal. 45–46.

²² Benton Johnson, *"Functionalism in Modern Sociology,"* hal. 46.

Jika dianalisis dengan menggunakan skema AGIL Parsons, maka peran Bank Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Adaptation*: Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga dan mengatur suplai uang untuk merespons tekanan nilai tukar rupiah dan inflasi yang melonjak.
2. *Goal Attainment*: Bank Indonesia berupaya mencapai tujuan menjaga kestabilan sistem keuangan, terutama melalui pengawasan terhadap bank-bank yang mengalami krisis likuiditas atau bahkan kolaps.
3. *Integration*: Dalam masa krisis, Bank Indonesia menjadi aktor penting dalam mengoordinasikan respons dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan bahkan lembaga internasional seperti IMF.
4. *Latency*: Bank Indonesia juga berperan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, melalui komunikasi kebijakan dan upaya mempertahankan nilai-nilai dasar sistem moneter yang berlaku.

Dengan demikian, peran Bank Indonesia tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan fungsi sosial yang menjaga keseimbangan sistem ekonomi nasional dan regional dari potensi keruntuhan. Teori struktural fungsional membantu menjelaskan bahwa meskipun sistem mengalami gangguan besar, keberadaan dan tindakan lembaga seperti Bank Indonesia merupakan mekanisme penting dalam menstabilkan sistem sosial-ekonomi secara keseluruhan.²³

4. Historiografi

Tahapan historiografi merupakan tahapan paling akhir dari rangkaian penulisan penelitian sejarah, yaitu berupa penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.²⁴ Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah, melalui tahap ini pengelompokkan pokok masalah penelitian, serta memudahkan pengalokasian penelitian agar lebih sistematis.

²³ George Ritzer, "*Sociological Theory*, 8th ed." (New York: McGraw-Hill, 2011), hal. 250.

²⁴ Dudung Abdurrahman, "*Metode Penelitian Sejarah*".

Topik dalam penulisan sejarah ini berjudul "**Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan dan Ketahanan Perbankan Syariah Selama Krisis Moneter (1997-1998)**".

BAB I merupakan pendahuluan, yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka serta langkah-langkah atau metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II merupakan pembahasan. Bahasan yang diangkat oleh penulis yaitu, Profil dari Bank Indonesia meliputi, latar belakang berdirinya, kedudukan dan fungsi, struktur organisasi Bank Indonesia, serta perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

BAB III merupakan pembahasan. Bahasan yang diangkat oleh penulis yaitu, peristiwa krisis moneter, peran Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter pada masa J. Soedradjad Djiwandono dan pergantian kepemimpinan pada Syahril Sabirin, krisis moneter dan tantangan Bank Muamalat Indonesia (1997-1998), serta peran Bank Indonesia terhadap ketahanan perbankan syariah.

BAB IV merupakan kesimpulan dari penelitian juga termuat saran yang ingin penulis sampaikan mengenai penelitian ini.

Pada bagian akhir penelitian terdapat daftar sumber yang memuat informasi atau referensi yang penulis pakai guna mendukung pembuatan penelitian, dan lampiran-lampiran.